

LAPORAN KINERJA INTERIM

PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT
DAN MAKANAN
TRIWULAN 1

2025



KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya yang melimpah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) kepada pemangku kepentingan dalam hal pencapaian kinerja dan anggaran Triwulan I. Laporan Kinerja Interim ini juga berfungsi sebagai dokumen evaluasi atas ketercapaian sasaran dan indikator kinerja satuan kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian

Kinerja PUSAKOM Tahun 2025.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja pertama PUSAKOM untuk periode tahun 2025 dan periode pelaksanaan RENSTRA 2025-2029. Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis PUSAKOM hingga triwulan I, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga berisi pencapaian kinerja baik anggaran maupun fisik kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan PUSAKOM pada Triwulan I tahun 2025. Laporan Kinerja Triwulan I ini juga menyajikan perbandingan capaian kinerja antar triwulan di tahun 2025.

Laporan akuntabilitas kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan pada Triwulan I tahun 2025. Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring capaian kinerja dalam mendukung pencapaian target sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, 29 April 2025

Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) memiliki tugas melaksanakan analisis kebijakan di bidang Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, setiap satuan kerja diwajibkan melaporkan akuntabilitas kinerjanya setiap triwulan melalui Laporan Kinerja Interim.

PUSAKOM sebagai satuan kerja di bawah BPOM telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan I. Laporan Kinerja Interim PUSAKOM memuat mengenai tugas dan fungsi; perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja triwulanan; evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulanan. Adapun fungsi PUSAKOM adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan administrasi pusat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. PUSAKOM juga melaksanakan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Berdasarkan rancangan strategis 2025-2029, PUSAKOM memiliki tujuan antara lain:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Organisasi yang Profesional Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Dalam proses pencapaian tujuan diatas, telah dirumuskan 2 (dua) sasaran kinerja dengan 6 (enam) indikator kinerja yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Pada akhir triwulan I, PUSAKOM telah melakukan evaluasi atas ketercapaian indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I terdapat satu indikator kinerja yang capaiannya dapat diukur triwulanan sedangkan 5 (lima) indikator lainnya baru dapat diukur di akhir tahun 2025. Berikut hasil evaluasi indikator kinerja yang dilakukan PUSAKOM pada triwulan I:

- a. Pada triwulan I tahun 2025, nilai persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
- b. Pada triwulan I tahun 2025, tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan telah dapat diukur pencapaiannya dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator telah efektif untuk mencapai target dengan capaian 103,71% dari target triwulan 1 dan tahun 2025. Dari sisi anggaran capaiannya belum efisien karena masih terdapat berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator ini.
- c. Pada triwulan I tahun 2025, indeks pembangunan ZI PUSAKOM belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
- d. Pada triwulan I tahun 2025, nilai AKIP PUSAKOM belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
- e. Pada triwulan I tahun 2025, indeks manajemen risiko PUSAKOM belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
- f. Pada triwulan I tahun 2025, nilai kinerja anggaran PUSAKOM belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.

Berikut rincian capaian indikator yang telah dapat diukur realisasinya hingga triwulan I:

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	87%	-	-	Akhir Tahun	-
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91	94,38	103,71%	Sangat Baik
	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	-	-	Akhir Tahun	-
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	-	-	Akhir Tahun	-

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	-	-	Akhir Tahun	-
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	-	-	Akhir Tahun	-

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran PUSAKOM hingga akhir triwulan I tahun 2025 ini adalah sebesar 8,76% atau Rp1.126.729.230,- dari PAGU Rp12.859.156.000,-. Dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025, PUSAKOM telah melakukan efisiensi dengan memblokir anggaran sebanyak Rp7.906.298.000,- sehingga sisa PAGU yang dapat digunakan adalah sebesar Rp4.952.858.000,-. Realisasi anggaran apabila mengacu pada anggaran yang dapat digunakan saja adalah sebesar 22,74%. Berikut rincian serapan anggaran untuk masing-masing jenis belanja:

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	2.905.542.000	841.398.083	28,96%
2	Belanja Barang	9.842.036.000	285.331.147	2,90%
3	Belanja Modal	111.578.000	0	0%
Total		12.859.156.000	1.126.729.230	8,76%

Pada 2025, PUSAKOM memiliki kegiatan prioritas yang terkait dengan analisis kebijakan dan juga menjadi output utama PUSAKOM yaitu:

1. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
2. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman Dan Bermutu
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC
4. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
5. Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025

Dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. PUSAKOM pada triwulan I ini baru melaksanakan tiga topik analisis kebijakan

yaitu untuk poin 1-3. Sedangkan topik poin 4-5 belum dilaksanakan karena alokasi anggaran kegiatan tersebut sebagian besar masih diblokir.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RPJMN 2020 - 2024	8
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	8
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024	17
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024	17
E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	18
F. METODE PENGUKURAN	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN.	26
B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	34
C. REALISASI ANGGARAN	36
D. ANALISIS EFISIENSI	39
BAB IV PENUTUP	43
A. KESIMPULAN	43
B. SARAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025	iv
Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I	v
Tabel 3. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional	13
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2025	17
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	19
Tabel 7. Komponen Pengungkit	21
Tabel 8. Komponen Hasil	21
Tabel 9. Predikat Nilai AKIP	22
Tabel 10. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	23
Tabel 11. Kriteria Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel 12. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran	25
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I	26
Tabel 14. Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran	27
Tabel 15. Capaian Kinerja Triwulan I	28
Tabel 16. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target	30
Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target tahunan	31
Tabel 18. Rekomendasi dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kinerja	35
Tabel 19. Realisasi Keuangan Triwulan I	36
Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator	40
Tabel 21. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Output	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	3
Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	4
Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	5
Gambar 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga pemerintahan non Kementerian yang melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan, BPOM telah menyusun rancangan visi tahun 2025-2029 dalam dokumen rancangan RENSTRA yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Berbagai fungsi dijalankan oleh BPOM guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari fungsi registrasi, standarisasi, pengawasan baik produksi maupun distribusi, dan fungsi pendukung lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM akan menjalankan berbagai program pengawasan Obat dan Makanan serta menerbitkan Peraturan/Regulasi/Keputusan yang terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan dari *pre-market* sampai dengan *post-market*. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) sebagai unit kerja pendukung pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan/keputusan/regulasi/program pengawasan Obat dan Makanan, melalui data dan informasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan. Berbagai analisis kebijakan seperti pemetaan data dan informasi Obat dan Makanan, analisis dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan serta analisis dan evaluasi kebijakan Obat dan Makanan telah dan akan terus dilakukan guna memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini PUSAKOM terus berupaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan, melalui peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan serta peningkatan publikasi dan advokasi hasil analisis kebijakan kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan I tahun 2025, PUSAKOM menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini digunakan sebagai evaluasi atas kinerja PUSAKOM pada triwulan I ini dan akan menjadi acuan perbaikan

kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, PUSAKOM merupakan unsur pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. PUSAKOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. PUSAKOM memiliki tugas “melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Dalam melaksanakan tugasnya, PUSAKOM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- c. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
- g. Selain keenam fungsi diatas PUSAKOM juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

PUSAKOM adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai *scientific evidence* yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan analisis kebijakan.

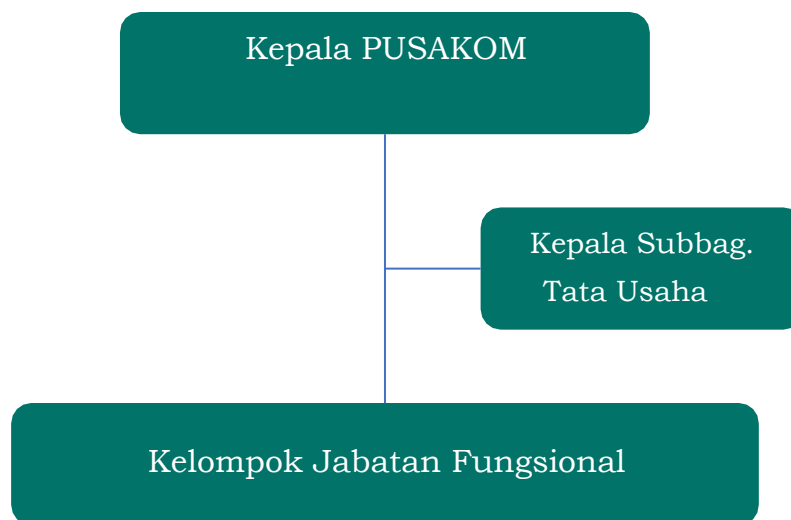
Secara garis besar fungsi PUSAKOM mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM dalam beberapa hal, yakni:

- a. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar, kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun revidi kebijakan;
- b. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) antara lain pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data

- evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan, kajian risiko keamanan serta penyediaan *baseline* data peredaran produk;
- c. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui penyediaan *baseline* data terkait masyarakat dan pelaku usaha;
 - d. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, PUSAKOM memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, sebagai berikut:



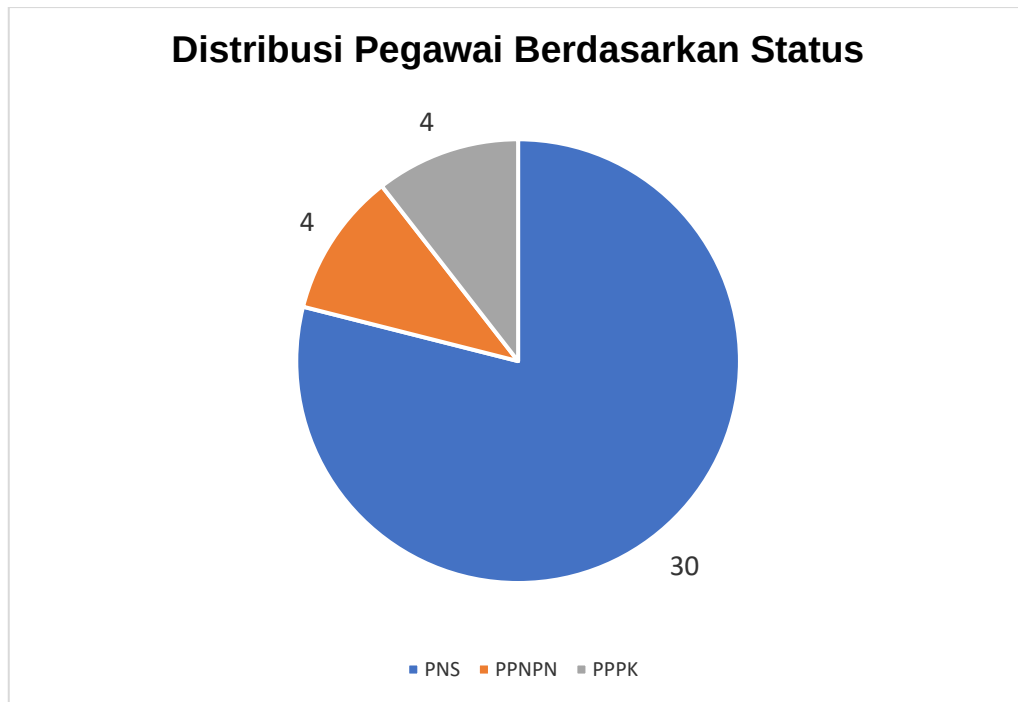
Gambar 1. Struktur Organisasi

PUSAKOM dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PUSAKOM membagi kelompok jabatan fungsional menjadi dua fungsi besar yaitu fungsi Analisis Kebijakan yang fokus melaksanakan kegiatan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, pelaporan dan evaluasi. Fungsi Dukungan Strategis Pimpinan yang spesifik melaksanakan kegiatan terkait penyiapan bahan pimpinan, pendampingan pimpinan dan monitoring arahan pimpinan. Dalam melaksanakan urusan administrasi non teknis, Sub Bagian Tata Usaha memegang peran yang cukup vital dalam menyediakan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, aset, arsip, perencanaan dan evaluasi kinerja, sumber daya manusia, dan dukungan teknologi informasi.

Seluruh tim ini dikoordinasi langsung oleh Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

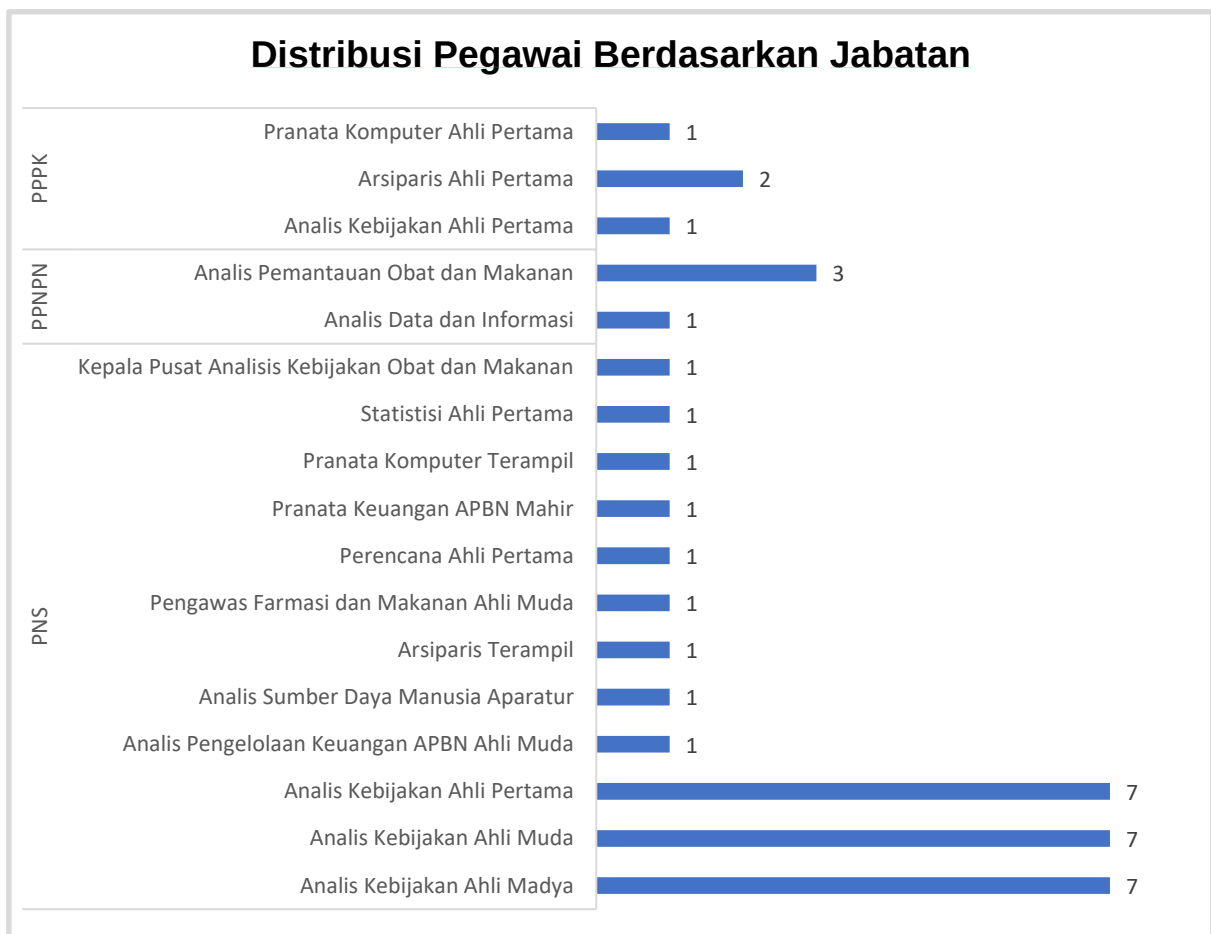
Dalam pelaksanaan struktur organisasi diatas PUSAKOM memiliki 34 ASN dan 4 PPNNP berdasarkan data Maret 2025.

Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



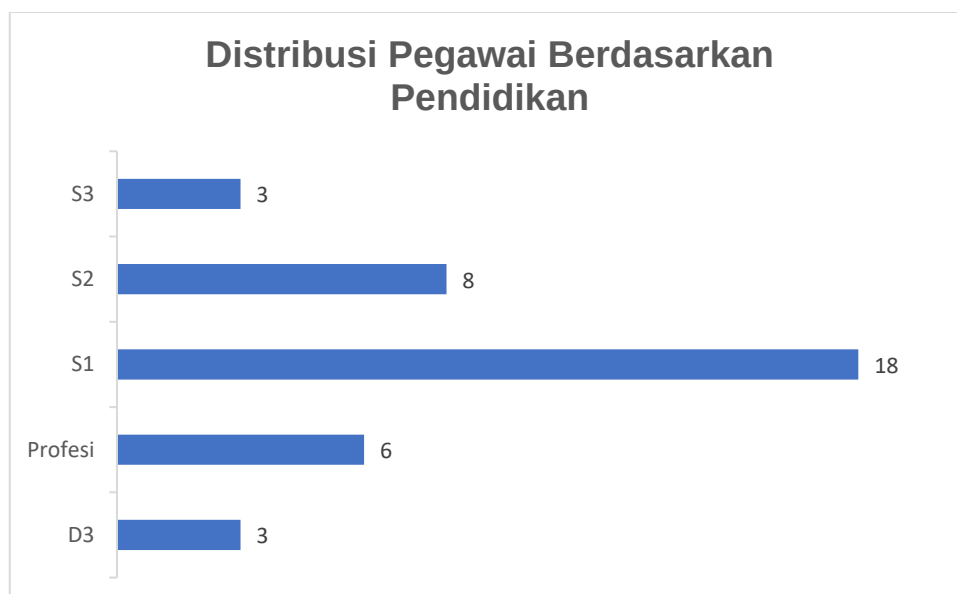
SDM PUSAKOM juga memiliki jabatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan fungsi di satker. Berikut sebaran pegawai PUSAKOM berdasarkan jabatan fungsionalnya.

Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional



Dalam mendukung analisis kebijakan yang lebih berkualitas, SDM PUSAKOM juga memiliki banyak pegawai dengan latar belakang pendidikan dengan lulusan S2. Berikut sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya.

Gambar 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



D.ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis PUSAKOM antara lain:

1. Kualitas kebijakan BPOM berlandaskan *evidence-based*, masih perlu terus didorong
2. Kompleksitas permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan perlu didekati dengan Analisis Kebijakan secara multi disiplin (*multi-disciplinary approach*).
3. Diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan secara lebih luas perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.
4. Advokasi pemanfaatan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan bisnis proses perlu terus ditingkatkan
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk metodologi dan *tools* dalam analisis kebijakan terus berkembang, sehingga menjadi tantangan untuk dikuasai oleh SDM PUSAKOM agar dapat menganalisis secara tajam dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan beberapa isu strategis yang diidentifikasi di atas, PUSAKOM perlu melakukan antisipasi di masa yang akan datang agar isu-isu yang teridentifikasi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan namun justru dapat dijadikan peluang peningkatan kinerja. Berikut beberapa strategi PUSAKOM untuk menghadapi isu strategis di masa mendatang.

1. Strategi pelaksanaan Analisis Kebijakan
 - a. Mengembangkan PUSAKOM sebagai pusat inovasi *regulatory science* bidang sediaan farmasi dan pangan olahan
 - b. Meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh PUSAKOM
 - c. Meningkatkan strategi komunikasi melalui diseminasi dan publikasi informasi hasil analisis kebijakan yang sesuai dengan tingkat literasi masyarakat
 - d. Membangun jejaring dan menjalin kerja sama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kualitas analisis kebijakan
 - e. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja terkait analisis kebijakan dan layanan dukungan strategis pimpinan
2. Strategi Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah
 - a. Menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai pedoman
 - b. Mengembangkan skema spesialisasi SDM agar terbentuk SDM yang

professional

- c. Menerapkan SAKIP, Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko sesuai pedoman
- d. Meningkatkan kapasitas SDM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya, dan tepat waktu
- e. Menerapkan standar sistem akuntansi pemerintah sesuai kaidah peraturan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2025-2029

RPJMN tahun 2025-2029 telah disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Berdasarkan peraturan tersebut Kementerian dan Lembaga dan Satuan Kerja di bawahnya wajib menyusun rencana strategis periode 2025-2029. Perencanaan strategis ini diwujudkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk kepada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja ini berupa proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek yaitu potensi, peluang dan kendala yang ditemui. Perencanaan strategis haruslah disusun secara komprehensif dan implementatif dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Perencanaan tersebut secara garis besar disusun dalam Rencana Strategis PUSAKOM.

Dalam dokumen RPJMN, BPOM berkontribusi terhadap PP 4 terkait Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan dengan indikator kinerja persentase sediaan farmasi yang aman dan bermutu yang dijabarkan menjadi KP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi. PUSAKOM secara *non direct* mendukung sasaran RPJMN yang diintervensi BPOM melalui analisis kebijakan Obat dan Makanan yang berkualitas guna memastikan peningkatan kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

B. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif karena akan menghasilkan output maupun *outcome* yang bersifat strategis. Rencana strategis (Renstra) disusun untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMN periode tahun 2025-2029 dan berorientasi kepada

hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kendala serta peluang yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sehingga pencapaian target dapat terealisasi dengan baik.

Renstra PUSAKOM diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk masa tahun 2025-2029. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas utama BPOM sangat strategis karena terkait langsung dalam perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain bertujuan pada perlindungan terhadap kesehatan konsumen, pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global.

Dalam rancangan renstra tahun 2025-2029, PUSAKOM memiliki dua sasaran strategis dan enam indikator kinerja yang mengacu pada dokumen rancangan renstra tahun 2025-2029. Berikut penjelasan sasaran strategis PUSAKOM yang telah dirumuskan.

1. Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas.

- Indikator Sasaran 1: Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan

Sasaran kegiatan PUSAKOM berisi rincian output yang harus dihasilkan guna mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Rincian output PUSAKOM yang menjadi turunan sasaran kegiatan ini adalah “Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. yang dimanfaatkan”. Dengan sasaran kegiatan ini, PUSAKOM akan memberikan kontribusi hasil analisis kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada inti proses bisnis BPOM.

Pencapaian sasaran kegiatan ini akan diukur melalui indikator persentase kemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan, yang dinilai berdasarkan:

1. *Stakeholder* internal BPOM, melalui survei untuk mengukur tingkat kemanfaatan hasil analisis kebijakan
2. *Stakeholder* eksternal BPOM, melalui analisis frekuensi publikasi hasil

analisis kebijakan.

Indikator ini mencerminkan persentase hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berhasil dimanfaatkan. Tingkat kemanfaatan diukur dengan mempertimbangkan aspek relevansi, aktualitas, kuantitas, dan daya inspirasi terhadap unit kerja internal BPOM. Hal ini mencakup pemanfaatan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau sebagai dasar untuk kegiatan lanjutan, serta kontribusi keilmuan kepada masyarakat. Tingkat kemanfaatan dinyatakan dalam lima kategori, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai 87 persen.

- Indikator Sasaran 2: Tingkat keberhasilan koordinasi layanan dukungan strategis pimpinan

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan fungsi dukungan strategis pimpinan yang dimiliki oleh PUSAKOM. Pencapaian indikator ini dihitung menggunakan survei kepada penerima layanan PUSAKOM terkait dukungan strategis pimpinan

2. Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Sasaran kegiatan ini berfokus pada kualitas tata kelola dan proses bisnis PUSAKOM. Pengelolaan organisasi yang bersih dan akuntabel menjadi prioritas BPOM yang juga harus diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh satuan kerja. Ketercapaian sasaran kinerja ini diukur dengan beberapa aspek seperti penerapan aspek reformasi birokrasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, implementasi manajemen risiko dan pengelolaan anggaran serta keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Berbagai aspek inilah yang nanti akan menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tata kelola pemerintah yang optimal. Berikut penjelasan dari masing masing ukuran keberhasilan dari sasaran ini.

- Indikator Sasaran 1: Nilai Pembangunan ZI PUSAKOM

Indikator kinerja ini mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis kelembagaan berdasarkan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang memiliki dimensi beberapa aspek antara lain, Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mengukur kinerja proses implementasi RB yang dilakukan di unit organisasi. Selain itu kinerja hasil dari penerapan RB di lingkungan pemerintah juga diukur dalam penilaian ini melalui Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta peningkatan capaian kinerja unit kerja dari tahun ke tahun. Seluruh aspek tersebut menjadi hal yang harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada periode renstra ini.

- **Indikator Sasaran 2: Nilai AKIP PUSAKOM**

Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana organisasi menerapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. PUSAKOM perlu memastikan setiap proses kerja didasarkan pada prinsip transparan dan akuntabel, didukung oleh pengelolaan data yang akurat, serta pengawasan yang berkesinambungan.

- **Indikator Sasaran 3: Indeks Manajemen Risiko PUSAKOM**

Indikator ini mengukur sejauh mana unit organisasi menerapkan prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Pengelolaan risiko yang efektif diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Indeks Manajemen Risiko mencerminkan kesiapan PUSAKOM untuk menghadapi tantangan operasional maupun strategis melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap pencapaian target indeks manajemen risiko diantaranya adalah penguatan sistem pengendalian internal dan pelatihan bagi pegawai mengenai manajemen risiko

- **Indikator Sasaran 4: Nilai Kinerja Anggaran PUSAKOM**

Indikator ini mengukur proses perencanaan anggaran (EKA) dan pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan mengukur kualitas perencanaan penyerapan anggaran, pelaksanaan revisi DIPA, pelaksanaan dan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan pelaporan capaian output. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN yang dialokasikan ke PUSAKOM. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara tepat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PUSAKOM.

Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah inefisiensi dan penyimpangan dalam rangka pencapaian sasaran strategis.

Berbagai sasaran dan indikator kinerjanya di atas kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi operasional dan cara perhitungannya masing-masing. Penjabaran definisi operasional dan cara perhitungan ini bermanfaat sebagai dokumen acuan dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja PUSAKOM. Berikut penjabaran dari definisi operasional dan cara perhitungan masing masing indikator kinerja:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Kinerja Tahun 2025
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	Rekomendasi kebijakan adalah saran dan masukan terkait kebijakan yang disampaikan kepada <i>stakeholder</i> untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang ideal. Rekomendasi Kebijakan di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi kebijakan yang digunakan untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Pemanfaatan hasil analisis kebijakan diukur menggunakan survei yang ditujukan kepada <i>stakeholder</i> PUSAKOM yang mengakses, meminta, dan memanfaatkan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh PUSAKOM. Survei dilakukan untuk mengukur beberapa aspek antara lain: relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi <i>stakeholder</i> dalam memanfaatkan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya. Persentase dimanfaatkan ini diukur berdasarkan atas hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh PUSAKOM tahun N-1. Persentase dimanfaatkan dinyatakan dalam rentang sebagai berikut: 81% – 100% : Sangat tinggi 61% – 80% : Tinggi 41% – 60% : Sedang 21% – 40% : Rendah 0% – 20% : Sangat Rendah	87%
	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan	Layanan dukungan strategis pimpinan adalah layanan yang berkaitan dengan sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah kegiatan Kepala BPOM untuk ruang lingkup: a. Penyiapan bahan substansi kegiatan,	91

	Strategis Pimpinan	b. Pendampingan/pengawasan dan/atau penyampaian notula kegiatan, serta monitoring tindak lanjut arahan	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM	86,5
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta	82

		meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.	
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)	5

		7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)	
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko	3,01

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan rencana tahunan atau biasa disebut Renja dari PUSAKOM. Dokumen ini menjadi dokumen awal dari proses perencanaan tahunan. Pada tahun 2025 yang merupakan tahun peralihan periode perencanaan jangka menengah maka penyusunan dokumen RKT ini mengacu pada dokumen hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sedangkan sasaran dan indikator kinerja PUSAKOM mengacu pada draft rancangan Rencana Strategis PUSAKOM. Berikut sasaran dan indikator kinerja PUSAKOM yang termuat dalam RKT Tahun 2025.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	85,46%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,2
3	Obat dan Makanan yang optimal	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	83,49
4		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,2
5		Nilai Kinerja Anggaran	90

D. PERJANJIAN KINERJA 2025

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan kewajiban setiap K/L sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014, yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. Penjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja berlaku dari 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Perjanjian kinerja tahun 2025 mengalami beberapa perubahan apabila dibandingkan dengan dokumen RKT tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian target kinerja menyesuaikan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dan mengakomodir tambahan indikator kinerja “tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan” menyesuaikan dengan perubahan draft rancangan renstra PUSAKOM 2025-2029. Perjanjian kinerja ini mengacu pada dokumen laporan kinerja tahun 2024 dan dokumen rancangan rencana strategis PUSAKOM Tahun 2025-2029. Detail rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87%
2		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5
4	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	83,49
5		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01
6		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5

E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target

triwulanan maupun bulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target triwulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. PUSAKOM telah melakukan *exercise* penetapan target periodik dalam rangka memastikan ketercapaian target tahunan tahun 2024 melalui dokumen RAPK ini. Berikut rencana aksi perjanjian kinerja PUSAKOM tahun 2025.

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87%	7.772.657
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	0	0	91	0	0	91	0	0	91	690.884
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,5	390.901
	Nilai AKIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	55.976

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan											
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,01	17.353
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3.931.385

F. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing masing indikator kinerja:

1. Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan survei kepada *stakeholder* internal yang memanfaatkan. Persentase dimanfaatkan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan oleh internal BPOM (a) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai pemanfaatan oleh eksternal BPOM (b) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya (n-1).

Persentase kemanfaatan = ((rata-rata nilai relevansi x 40%) + (rata-rata nilai aktualitas x 20%) + (rata-rata nilai aktualitas x 30%) + rata-rata nilai menginspirasi x 10%)) x 90%) +(kemanfaatan eksternal x 10%)

2. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan
Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan tools survei dengan skala likert (1-4) yang kemudian dikonversi dengan dikalikan dengan bobot “25” dengan rentang tingkat keberhasilan dinyatakan sebagai berikut:

25,00 = sangat kurang

25,01-50,00 = kurang

50,01-75,00 = baik

75,01-100,00 = sangat baik

3. Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil:

Tabel 7. Komponen Pengungkit

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 8. Komponen Hasil

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Penilaian indikator ini dilakukan dengan melakukan *assessment* terhadap implementasi dari berbagai aspek RB di atas. Penilaian dilakukan secara internal oleh tim RB dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama. Nilai akhir yang akan dipakai sebagai realisasi indikator ini adalah nilai yang resmi dikeluarkan oleh Inspektorat Utama.

4. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Indikator nilai AKIP PUSAKOM dinilai dengan melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama BPOM.

Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30
- b. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30
- c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25

Predikat nilai AKIP dituangkan dalam range berikut:

Tabel 9. Predikat Nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat Memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70- 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60- 70	Baik. Terdapat Gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50- 60	Cukup (memadai). Terdapat Gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan kerja
6	C	>30- 50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP

5. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai kinerja anggaran diperhitungkan dari 2 aspek nilai pengelolaan anggaran, yaitu nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobotnya masing-masing. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

6. Indeks Maturitas Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 10. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naïve menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas Skor

$$\text{Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Kesimpulan dari capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:

Tabel 11. Kriteria Capaian Indikator Kinerja

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	$x > 110\%$	Abu Gelap	-
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	Biru	Efektif
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	Hijau	Efektif
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	Kuning	Kurang Efektif
Kurang	$x < 60\%$	Merah	Tidak Efektif

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk *range* untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut *range* parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 12. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja

PUSAKOM telah melakukan berbagai kegiatan untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* baik internal BPOM untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan maupun eksternal BPOM untuk menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, PUSAKOM juga menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Setiap kegiatan mendukung sasaran dan indikator kinerja yang diukur keberhasilannya secara periodik. Pada triwulan I tahun 2025 ini, PUSAKOM telah melakukan pengukuran kinerja untuk 1 indikator kinerja, sedangkan 5 indikator kinerja lainnya baru dapat diukur capaiannya pada akhir tahun 2025. Berikut realisasi dan capaian indikator kinerja PUSAKOM hingga akhir triwulan I:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja				Kriteria
			Target Tahunan	Target Triwulan 1	Realisasi	% Capaian	
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	87%	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91	94,38	103,71%	Sangat Baik
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis	3,01	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja				Kriteria
			Target Tahunan	Target Triwulan 1	Realisasi	% Capaian	
		Kebijakan Obat dan Makanan					

Berdasarkan tabel realisasi dan capaian kinerja di atas dapat diketahui bahwa satu indikator kinerja yang dapat diukur di triwulan I telah dapat mencapai target triwulanannya. Dari data capaian di atas kemudian dilakukan perhitungan nilai pencapaian sasaran PUSAKOM triwulan I tahun 2025. Berikut hasil perhitungan nilai sasaran strategis:

Tabel 14. Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran

Sasaran Stretegis	NSS
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	103,71%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai pencapaian sasaran PUSAKOM pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 103,71% dengan predikat Sangat Baik. Dalam laporan kinerja ini tersaji pula realisasi rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Triwulan I

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			Tahunan	B1	B2	B3	Tahunan	B1	B2	B3	Tahunan	B1	B2	B3
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	87%	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	0	0	91	91	0	0	94,38	103,71%	0	0	103,71%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun

Berdasarkan realisasi periodik tersebut dapat dilakukan analisis per masing-masing indikator. Analisis tersebut dilakukan per indikator dan dapat dibandingkan kenaikan maupun penurunannya pada setiap periode. Selain itu akan disandingkan pula realisasi setiap indikator dengan target tahunannya. Analisis tersebut tertuang pada bagian berikutnya yaitu “Analisis Akuntabilitas Kinerja”.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis yang akan disajikan pada bagian ini meliputi perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja triwulan I, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja tahunan, analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian, dan analisis program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Berikut analisis akuntabilitas kinerja PUSAKOM pada triwulan I.

a. Sasaran Kinerja 1 “Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas” Indikator Kinerja “Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan I dan target tahunan Indikator pertama dari sasaran ini diukur melalui 2 parameter yaitu kemanfaatan internal dan kemanfaatan eksternal. Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Kegiatan PUSAKOM tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:
 - Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
 - Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman Dan Bermutu
 - Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC
 - Advokasi kebijakan dan Policy Advisory
 - Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
 - Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan
 - Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025
 - Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan

- Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
- Pengembangan Sistem Informasi PUSAKOM
- Pengadaan Alat Pengolah Data
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

b. Sasaran Kinerja 1 “Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas” Indikator Kinerja “Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan I

Sasaran strategis ini merupakan perwujudan dari penambahan fungsi dukungan strategis pimpinan PUSAKOM. Keberhasilannya diukur dari tingkat keberhasilan dalam layanan dukungan strategis pimpinan melalui survei yang ditujukan kepada *stakeholder* yang menerima layanan dukungan strategis pimpinan yang meliputi layanan:

- Koordinasi penyusunan dokumen substansi kegiatan Kepala BPOM
- Koordinasi pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi pimpinan saat hari pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi penyampaian notulen/laporan pasca pelaksanaan kegiatan.

Berikut hasil pengukuran keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan hingga triwulan I tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target triwulanan

Indikator	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kategori
Tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan	91	94,38	103,71%	“Tercapai/ Melampaui “Sangat Baik””

- Perbandingan Realisasi dengan target tahunan

Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target tahunan

Indikator	Target Tahunan	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kategori
Tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan	91	94,38	103,71%	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan realisasi diatas dapat dilihat bahwa realisasi triwulan I telah dapat mencapai target tahun 2025 dengan capaian 103,71%.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tingkat keberhasilan koordinasi dukungan strategis pimpinan ini diperoleh dari hasil survei terhadap *stakeholder* PUSAKOM yang telah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan kepala BPOM dan dalam proses penyelenggaraannya melibatkan PUSAKOM dalam penyiapan dan pendampingan substansi Kepala BPOM dan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala BPOM. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada triwulan I diperoleh dari pelaksanaan pendampingan dan penyiapan bahan pimpinan yang telah dilaksanakan dan dinilai baik oleh unit kerja penyelenggara kegiatan yang melibatkan kepala Badan POM.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

Beberapa kegiatan kinerja yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis ini antara lain:

- Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan

Salah satu tugas PUSAKOM adalah melakukan fungsi koordinasi bahan substansi strategis pimpinan. Bahan substansi strategis tersebut meliputi bahan substansi yang digunakan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan kedinasan serta hasil pemantauan tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan strategis. Oleh karena itu, Tim Dukungan Strategis Pimpinan (DSP) melakukan pengawalan dan pendampingan bahan

substansi strategis tersebut pada setiap kegiatan kedinasan Kepala BPOM di dalam negeri, baik di dalam kota maupun luar kota.

- Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan

Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan. Hasil dari pengawalan ketersediaan bahan substansi pimpinan yaitu berupa dokumentasi arahan dan kebijakan pimpinan. Pemantauan implementasi kebijakan Pimpinan dilakukan guna memastikan setiap arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai bagian dari implementasi profesionalisme dan kredibilitas BPOM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan

- Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan

Dukungan substansi kegiatan pimpinan diselenggarakan dalam bentuk koordinasi, analisis, dan pengkajian substansi untuk digunakan oleh Pimpinan BPOM. Kegiatan berupa penyiapan dan penyusunan dokumen substansi kegiatan Pimpinan dengan mengolah kontribusi data, informasi, dan draft bahan dari unit kerja terkait.

c. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan I dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui asesmen indeks Pembangunan ZI yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan PUSAKOM tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

- Peningkatan Kompetensi Analisis Kebijakan (In House Training)

- Penguatan Nilai-nilai Reformasi Birokrasi
 - Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga
 - Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
- d. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”
- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan I dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui asesmen LKE SAKIP yang dilakukan oleh inspektorat BPOM
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Kegiatan PUSAKOM tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:
 - Penerapan Sistem Mutu
Kegiatan yang dilakukan meliputi kaji ulang SOP PUSAKOM untuk memastikan seluruh kegiatan utama PUSAKOM dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun dan merumuskan SOP baru terkait Penyusunan Data Kinerja untuk memastikan keandalan dan validitas data kinerja yang dihasilkan oleh PUSAKOM.
- e. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”
- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan I dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui penilaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di akhir tahun 2025 dan IKPA dari Kementerian keuangan.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan

penyempurnaan kinerja ke depan analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan PUSAKOM tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Operasional Perkantoran
- Penatausahaan BMN

- f. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan I dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui asesmen LKE SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Kegiatan PUSAKOM tahun 2024 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:
 - Seminar Workshop Training Mengikuti Kegiatan BPOM di dalam negeri

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI PERIODE SEBELUMNYA

Sebagai upaya untuk terus melakukan pemanfaatan dari hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, PUSAKOM akan melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja interim triwulan I. Berikut matriks tindak lanjut atas berbagai rekomendasi dari evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 18. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja

Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
								Status	Rencana Aksi	
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	Maret	91.00	94.38	103.71 %	Realisasi tahun 2024 melampaui target	Secara konsisten menyelenggarakan layanan dukungan strategis pimpinan seperti: penyiapan bahan, pendampingan kegiatan sesuai agenda kepala Badan POM dan monev arahan pimpinan melalui Desk TL arahan Pimpinan	Setiap triwulan	Progress	Melakukan desk TL Arahan Pimpinan, Melakukan pendampingan pimpinan dan penyiapan bahan pimpinan	Akan dievaluasi lebih lanjut
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Target tahun 2024 tercapai	Telah dilakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2025. LKE telah disusun dengan mempertimbangkan masukan hasil penilaian RB tahun 2024. Akan dilakukan desk penilaian Mandiri Pembangunan ZI PUSAKOM	Akhir Triwulan 2	Progress	Melaksanakan desk penilaian ZI Bersama inspektorat BPOM	Akan dievaluasi lebih lanjut
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Target tahun 2024 tidak tercapai	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 Perbaikan kualitas data kinerja Perbaikan kualitas laporan kinerja Peningkatan efektivitas evaluasi internal dalam upaya pencapaian kinerja	Triwulan 3	Progress	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi SAKIP tahun 2024	Akan dievaluasi lebih lanjut
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Realisasi diakhir tahun	Menyusun risk register pada awal semester 2 Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di PUSAKOM Pelaksanaan Audit PIPK secara berkala	Awal Triwulan 3	Progress	Menyusun risk register semester 2	Akan dievaluasi lebih lanjut
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Realisasi diakhir tahun	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	Setiap triwulan	Progress	Pemutakhiran RPD pada Triwulan II Revisi Anggaran Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu Pelaporan Capaian Output setiap awal bulan	Akan dievaluasi lebih lanjut
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	Maret	0	0	0	Realisasi tahun 2024 melampaui target	1. Melaksanakan berbagai topik analisis kebijakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan 2. 2. Melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan tahun sebelumnya	Triwulan 4	Progress	Melaksanakan forum diseminasi hasil analisis kebijakan pada triwulan III Melaksanakan analisis kebijakan sesuai timeline	Akan dievaluasi lebih lanjut

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA- 063.01.1.632441/2025 Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025 PUSAKOM memiliki dua alokasi anggaran pada Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp8.812.771.000,- dan Program Dukungan manajemen sebesar Rp4.046.385.000,- dan seluruhnya adalah Rupiah Murni (RM), dengan total anggaran sebesar Rp12.859.156.000,- (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Nilai ini merupakan anggaran awal yang dimiliki PUSAKOM sebelum diblokir untuk efisiensi. Nilai anggaran tahun 2025 yang mengalami blokir efisiensi adalah senilai Rp7.906.298.000,-, sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan adalah Rp4.952.858.000,-. Realisasi anggaran PUSAKOM pada triwulan I berdasarkan PAGU awal adalah sebesar 8,76% atau Rp1.126.729.230,- dan apabila dibandingkan dengan PAGU pasca efisiensi, realisasi PUSAKOM triwulan I adalah sebesar 22,74%. Capaian anggaran PUSAKOM ini berada diatas target serapat triwulan I yaitu 15%. Berikut rincian realisasi anggaran PUSAKOM per sub komponen hingga akhir triwulan I

Tabel 19. Realisasi Keuangan Triwulan I

No	Output/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	Capaian
4135.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				
A	Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	7.003.000	0	0,00%
B	Penguatan Nilai Nilai Reformasi Birokrasi	15.720.000	5.166.000	32,86%
C	Penerapan Sistem Mutu	14.175.000	9.375.500	66,14%
D	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	59.116.000	16.575.079	28,04%
E	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	0	0	0,00%
4135.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
051 Perencanaan Kebutuhan Analisis Kebijakan				
A	Koordinasi dan Pembinaan	15.720.000	7.328.000	46,62%

No	Output/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	Capaian
	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan			
052 Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
A	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	30.175.000	2.404.000	7,97%
B	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman Dan Bermutu	462.387.000	9.561.000	2,07%
C	Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC	36.200.000	5.247.400	14,50%
D	Advokasi kebijakan dan Policy Advisory	37.200.000	5.852.500	15,73%
E	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	38.225.000	7.716.000	20,19%
F	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan	253.345.000	27.951.356	11,03%
G	Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025	99.870.000	6.708.000	6,72%
H	Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan (In House Training)	0	0	0,00%
053 Diseminasi Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan				
A	Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2025	24.150.000	-	0,00%
B	Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	242.980.000	-	0,00%
C	Pengembangan Sistem Informasi	5.550.000	2.506.800	45,17%

No	Output/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	Capaian
	PUSAKOM			
054 Dukungan Strategis Pimpinan				
A	Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan	14.040.000	8.712.240	62,05%
B	Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan	103.275.000	40.927.271	39,63%
C	Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan	27.039.000	18.795.250	69,51%
CAB.001 Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9.000.000	0	0,00%
CAN.001Perangkat pengolah data dan komunikasi				
051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				
A	<i>Pengadaan Alat Pengolah Data</i>	0	0	0,00%
6384.EBA.956 Layanan BMN				
054 Penatausahaan BMN				
A	Penatausahaan BMN PUSAKOM	2.464.000	0	0,00%
6384.EBA.994 Layanan Perkantoran PRKOM				
001 Gaji dan Tunjangan				
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.905.542.000	691.108.614	23,79%
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12.330.000	0	0,00%
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	60.000.000	7.586.235	12,64%
C	Perawatan Kendaraan Kantor	27.500.000	5.000.000	18,18%
D	Langganan Daya dan Jasa	2.400.000	840.516	35,02%
E	Operasional Perkantoran	447.452.000	76.662.000	17,13%
F	Pemeriksaan Kesehatan	0	0	0,00%

*) Data realisasi SP2D Aplikasi SAKTI

D. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung % *capaian output* dan % *capaian input*. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % *capaian output* dengan % *capaian input*. Selanjutnya dihitung Tingkat Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi (SE), dimana nilai SE adalah 1. Apabila $1,81 \geq IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien dan apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Berikut rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Hasil perhitungan indeks efisiensi dan tingkat efisiensi terhadap masing masing indikator kinerja dan rincian output dalam perjanjian kinerja PUSAKOM triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 21. dan Tabel 22. secara berturut turut.

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator

No	Sasaran	Indikator	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE
			T	R	%	T	R	%		
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	87%	0	0%	7.772.657.000	67.947.056	0,87%	0,00	Belum dapat disimpulkan
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	94,38	103,71 %	690.884.000	68.434.761	9,91%	10,47	Tidak Efisien
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	0	0%	390.901.000	29.069.079	7,44%	0,00	Belum dapat disimpulkan
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	0%	55.976.000	9.375.500	16,75%	0,00	Belum dapat disimpulkan
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	0%	3.931.385.000	781.197.365	19,87%	0,00	Belum dapat disimpulkan
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	0	0%	17.353.000	-	0,00%	0,00	Belum dapat disimpulkan

Tabel 21. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Output

Nama Program/Kegiatan/Rincian Output	Volume Output				Anggaran				IE	TE
	Target Awal	Target pasca Blokir	Realisasi Fisik	% Capaian	Pagu	PAGU pasca Blokir	Realisasi	% Capaian		
Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	4	3	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0%	0,00%	Belum dapat disimpulkan
Perangkat pengolah data dan komunikasi (anggaran diblokir seluruhnya)	10	2	0	0	11.578.000	0	0	0%	0,00%!	Belum dapat disimpulkan
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	5	3	Progres 14,6%	0	8.543.403.000	1.390.156.000	164.704.853	11,85%	1,2321	Efisien
Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	5	4	Progres 35%	0	248.790.000	96.014.000	32.951.579	34,32%	1,0198	Efisien
Layanan Perkantoran PUSAKOM	1	1	Progres 25%	25%	4.038.737.000	3.455.224.000	1.047.656.363	30,32%	0,8270	Tidak Efisien
Layanan BMN	1	1	0	0	7.648.000	2.464.000	0	0%	0,00%	Belum dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel 21. Efisiensi penggunaan anggaran untuk indikator kinerja PUSAKOM yang dapat diukur pada triwulan I adalah efisiensi untuk pelaksanaan indikator “Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan” dengan hasil tidak efisien. Ketidakefisienan penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator ini disebabkan karena kegiatan yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator ini masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan. PUSAKOM masih perlu melaksanakan kegiatan pendampingan pimpinan, penyiapan bahan dan monev tindak lanjut arahan pimpinan untuk dapat mempertahankan capaian indikator “Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan” hingga akhir tahun 2025. Indikator lain yang dimiliki PUSAKOM belum dapat dinilai efisiensinya karena capaian kinerjanya baru dapat diukur di akhir tahun 2025.

Sedangkan dari sisi efisiensi pencapaian target output, terdapat tiga rincian output yang dapat diukur tingkat efisiensinya yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
Rincian output ini telah mencatatkan performa efisien dalam penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan progres kegiatan analisis kebijakan hingga triwulan I
2. Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan
Rincian output ini telah mencatatkan performa efisien dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama antar instansi, penguatan nilai RB dan penerapan sistem mutu hingga triwulan 1.
3. Layanan Perkantoran PUSAKOM
Rincian output ini masih mencatatkan performa tidak efisien dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran gaji serta pemeliharaan perkantoran. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran gaji bulan April telah masuk ke realisasi bulan Maret sedangkan realisasi riilnya baru dibayarkan pada 1 April 2025.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada triwulan I tahun anggaran 2025 PUSAKOM telah melaksanakan pengukuran terhadap 1 indikator kinerja sesuai dengan rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025. Hanya ada satu indikator yang dapat diukur pada triwulan I yaitu tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan dengan hasil terealisasi sesuai target, kategori “sangat baik”.

Dari sisi anggaran PUSAKOM pada triwulan I tahun 2025 telah mencatatkan realisasi sebesar Rp1.126.729.230,- dari total anggaran sebesar Rp12.859.156.000,- atau sebesar 8,76%. Dan apabila dibandingkan dengan PAGU diluar blokir efisiensi senilai Rp4.952.858.000,- maka realisasinya adalah 22,74%.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran strategis PUSAKOM tahun 2024 antara lain adalah :

1. Melakukan *desk* tindak lanjut arahan Pimpinan, melakukan pendampingan pimpinan dan menyiapkan bahan pimpinan
2. Melaksanakan *desk* penilaian ZI bersama Inspektorat BPOM untuk mendukung pencapaian nilai pembangunan ZI PUSAKOM
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi SAKIP tahun 2024 untuk meningkatkan nilai AKIP PUSAKOM
4. Menyusun *risk register* semester 2 sebagai upaya mencapai target Indeks Manajemen Risiko PUSAKOM
5. Pemutakhiran RPD pada triwulan II, revisi anggaran, pengelolaan UP dan TUP tepat waktu dan pelaporan capaian output setiap awal bulan untuk mendukung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran
6. Melaksanakan forum diseminasi hasil analisis kebijakan pada triwulan III dan melaksanakan analisis kebijakan sesuai *timeline* untuk mendukung pencapaian indikator persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan.

Dalam penyusunan laporan kinerja interim ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dalam menyajikan data yang mendukung uraian dan analisis ke depannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan

penyajian laporan ini. Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan mendatang

